

PEMIKIRAN MACCAE RI LUWU PADA SISTEM KEPEMIMPINAN TRADISIONAL DI LUWU

Nur Madhinatul Ilmi¹, Fatimah Azis²

madhinatul30@gmail.com¹, fatimah.azis@unismuh.ac.id²

Universitas Muhammadiyah Makassar

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemikiran Maccae ri Luwu terhadap sistem kepemimpinan tradisional di wilayah Luwu, Sulawesi Selatan. Maccae ri Luwu merupakan kelompok perempuan terpelajar yang memiliki peran penting dalam proses politik dan sosial, terutama dalam memberikan nasihat dan pertimbangan kepada raja atau pemimpin lokal. Dalam sistem kepemimpinan tradisional di Luwu, mereka memainkan peran sebagai penjaga nilai-nilai moral, etika, serta adat istiadat yang menjadi pedoman bagi pemimpin dalam menjalankan tugasnya. Melalui metode kualitatif, dengan pendekatan historis dan etnografis, penelitian ini mengkaji kontribusi intelektual dan sosial Maccae ri Luwu serta implikasi pemikiran mereka terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh penguasa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Maccae ri Luwu tidak hanya menjadi figur simbolis dalam masyarakat, tetapi juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap stabilitas politik dan kesejahteraan masyarakat Luwu pada masa lalu. Studi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran perempuan dalam sistem kepemimpinan tradisional dan bagaimana nilai-nilai kearifan lokal tersebut relevan dalam konteks kepemimpinan saat ini.

Kata Kunci: Maccae Ri Luwu, Kepemimpinan Tradisional, Luwu, Perempuan, Kearifan Lokal.

ABSTRAK

This study aims to analyze the thoughts of Maccae ri Luwu on the traditional leadership system in the Luwu region, South Sulawesi. Maccae ri Luwu is a group of educated women who have an important role in the political and social process, especially in providing advice and considerations to the king or local leader. In the traditional leadership system in Luwu, they play a role as guardians of moral values, ethics, and customs that serve as guidelines for leaders in carrying out their duties. Through qualitative methods, with a historical and ethnographic approach, this study examines the intellectual and social contributions of Maccae ri Luwu and the implications of their thoughts on policies taken by the rulers. The results of the study show that Maccae ri Luwu are not only symbolic figures in society, but also have a significant influence on the political stability and welfare of the Luwu community in the past. This study is expected to provide a deeper understanding of the role of women in the traditional leadership system and how these local wisdom values are relevant in the context of current leadership.

Keywords: Maccae Ri Luwu, Traditional Leadership, Luwu, Women, Local Wisdom

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4 dinyatakan, bahwa "...untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial..."

Cita-cita negara yang tertera dalam pembukaan Undang-Undang dasar 1945 tersebut di atas masih belum terlaksana. Masyarakat masih merasakan adanya kesenjangan. Oleh karena itu menurut Tirto (2012:3) ada semacam ruang kosong yang semakin luas membentang antara "negara" dan "warganegara". Janji kemerdekaan dan konstitusi bahwa

negara akan mengurus warganya terbukti jauh dari apa yang diniatkan. Negara terbukti merupakan arena pertarungan antara elit politik yang masing-masing pihak selalu mengatasnamakan rakyat. Jatuh bangunnya pemerintahan sejak awal kemerdekaan, hingga hari ini, memperlihatkan bahwa hubungan antara negara dan warganegara, tidak pernah berlangsung dengan aman, stabil dan berkelanjutan.

Oleh karena itu maka kondisi demikian memunculkan apa yang disebut ketidaksabihan struktural, yakni akibat tidak terdistribusinya akses terhadap kekuasaan bagi warga negara secara merata. Tidak terbuktinya janji konstitusi yang mengandaikan bahwa pemimpin negara akan memikirkan nasib warga negaranya, disatu sisi, dan di sisi lain, terakumulasi akses terhadap kekuasaan hanya pada elit politik dan pemilik modal, merupakan suatu ketidakadilan yang bersifat struktural (Tirto, 2012: 5).

Kegagalan negara (pemerintah) untuk membangun sebuah masyarakat yang didasari pada kesetaraan, kebersamaan, senasib dan sepenanggungan juga mendorong terjadinya konflik di berbagai daerah. Masyarakat mencoba mencari alternatif lain untuk keluar dari permasalahan yang di hadapi dan dirasakan. Modernisme/modernisasi ataupun globalisasi dengan semangat postmodernismenya tidak mampu memecahkan semua persoalan kemanusiaan. Oleh karena itu yang lokal/sub nasional bangkit untuk menawarkan alternatif bagi kehidupan politik, sosial, budaya dan ekonomi dalam masyarakat. Dalam hal ini masih banyak kearifan lokal yang dimiliki oleh sub etnis yang bisa dijadikan model dalam sistem politik, di Sulawesi Selatan khususnya dan Indonesia pada umumnya. Misalnya saja sistem kepemimpinan tradisional di Sulawesi Selatan sangat kaya dengan nilai-nilai kepemimpinan yang masih bisa diterapkan pada saat ini. Seperti halnya nilai-nilai pemikiran para *to acca* atau orang pintar. Seperti halnya Pemikiran *La Mellong Kajaolaliddo* di Kerajaan Bone dan Pemikiran *Maccae ri Luwu* di Kerajaan Luwu dan Soppeng.

Luwu sebagai sebuah kerajaan besar dan pertama di Sulawesi Selatan serasi dengan nilai-nilai yang tidak kalah dengan sistem kepemimpinan modern. Seperti sistem kepemimpinan *Kedatuan Luwu* yang mana menerapkan pemikiran-pemikiran orang terdahulu seperti *Maccae ri Luwu*. Namun saat ini paham modernisme telah mengalahkan nilai-nilai budaya nasional dan budaya lokal. Kebersamaan dalam sistem kepemimpinan tradisional/datu sudah terpinggirkan dan dianggap ketinggalan zaman, padahal sangat kaya akan kandungan makna, pesan-pesan kemanusiaan dan nilai-nilai budaya yang masih relevan dengan kondisi saat ini untuk menjaga keharmonisan hidup manusia.

Era pos-modernisme telah menyadarkan manusia tentang pentingnya hal-hal yang bersifat non-material sebagai kebutuhan yang sangat mendasar lebih dari kebutuhan materi. Dalam perspektif ini, pemikiran-pemikiran dalam sistem kepemimpinan tradisional di Luwu sebagai salah satu warisan budaya Bugis yang kaya dengan nilai-nilai dan ajaran-ajaran dalam kehidupan manusia, khususnya manusia Bugis, dapat menjadi salah satu alternatif yang dijadikan sebagai pedoman hidup manusia di tengah-tengah kekeringan dan kehausan manusia terhadap eksistensi manusia di muka bumi sebagai khalifah. Oleh sebab itu, perlu direaktualisasi, di-refungsionalisasi, dan direinterpretasi serta diikuti dengan upaya pelestarian yang berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan pendekatan diakronik. Pengumpulan data melalui wawancara kepada beberapa informan, diantaranya adalah *Datu Luwu* yang ada saat ini dan beberapa perangkat adat pada istana *Kedatuan Luwu*. Disamping itu data wawancara didukung dengan melakukan observasi dan studi pustaka/studi dokumentasi, yakni membaca tulisan-tulisan terdahulu yang berkaitan dengan judul penelitian ini, yang dilakukan mulai dari awal pengumpulan data hingga penulisan berlangsung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi

Kota Palopo dulunya merupakan ibu Kota kabupaten Luwu, namun setelah dimekarkan menjadi empat kabupaten, yakni Luwu, Palopo, Luwu Utara, dan Luwu Timur, maka saat ini Kota Palopo berdiri sendiri. Kota Palopo selain berdiri sendiri, juga merupakan bekas Kedatuan Luwu yang dibuktikan dengan adanya bekas istana bangunan Belanda dan masjid tua yang dikenal dengan Masjid Jami'.

Pada awal terbentuknya Kota Palopo sebagai daerah otonom, maka secara administrasi pemerintahan, kota Palopo memiliki 4 (empat) wilayah kecamatan dan 19 kelurahan, serta 9 desa. Seiring perkembangan jumlah penduduk, maka pada tahun 2006 hingga saat ini, wilayah Kecamatan Kota Palopo dimekarkan menjadi 9 kecamatan dan 48 kelurahan.

Jumlah penduduk Kota Palopo sekitar 147.932 jiwa, yang terdiri atas 72.520 jiwa laki-laki dan 75.412 perempuan. Tiga kecamatan mempunyai penduduk yang paling banyak, diantaranya Kecamatan Wara, Kecamatan Wara Timur, Kecamatan Wara Utara.

Berdasarkan keyakinan, penduduk Kota Palopo beragama Islam. Sekitar 85% dari jumlah penduduk Kota Palopo. Masyarakat Luwu telah memeluk Islam sejak zaman kerajaan yang dibuktikan dengan hadirnya masjid tua (Jami') di tengah Kota Palopo. Dari segi etnis, masyarakat Kota Palopo sangat heterogen yang terdiri atas beberapa etnis dan sub etnis, diantaranya adalah Bugis, Toraja dan sub etnis Rongkong.

Bahasa yang digunakan dalam pergaulan sehari-hari terdiri atas bahasa Bugis (Ware) dan bahasa Tae (termasuk di dalamnya bahasa Rongkong dan Toraja). Bagi anak muda menggunakan bahasa Indonesia berdialek Palopo.

B. Sejarah Kedatuan Luwu

Secara historis Luwu merupakan kerajaan tertua di Sulawesi Selatan, bahkan dipandang sebagai asal-usul raja-raja di Sulawesi Selatan (Abidin, 1999: 103). Hal ini dibuktikan dengan adanya penghargaan terhadap kaum bangsawan Luwu. Disamping itu hadirnya artefak berupa istana yang merupakan realita kekinian Kerajaan Luwu yang berada tepat di sentral Kota Palopo. Bahkan Kern dalam Abidin (1999:103) menyatakan, bahwa Kedatuan Luwu merupakan kerajaan maritim terbesar yang sering mengirimkan anak-anak bangsawannya untuk pergi berlayar sampai ke negeri asing.

Kedatuan Luwu dipimpin oleh seorang raja yang disebut (address of reference) pajung. Kemudian pajung dipanggil datu. Di dalam menjalankan sistem pemerintahannya pajung dibantu oleh beberapa pejabat kerajaan yang disebut dengan pakkatenni ade yang terdiri atas: Opu Patunru, Opu Cenning, Opu Pabicara, Opu Temmarilaleng, dan Opu Balirante.

Pada masa Pemerintahan Kedatuan Luwu, wilayah kekuasaannya sangat luas, sehingga secara garis besar wilayah kekuasaan Kedatuan Luwu dibagi atas 3 yang masing-masing dipimpin oleh seorang pemimpin yang disebut dengan Ma'dika Ponrang, Ma'dika Bua, dan Makole Baebunta. Mereka merupakan perpanjangan tangan dari pajung dalam menjalankan pemerintahannya di daerah-daerah. Ketiga pemimpin tersebut dikenal dengan istilah ade telluE.

Untuk lebih jelasnya struktur pemerintahan Kerajaan Luwu pada masa dahulu dapat dilihat pada bagan di bawah ini:

1. Datu/pajung
2. Kadi
3. Pakkatenni ade
4. Bendea tellue
5. Anak tellue

6. Bete-bete tellu

Berdasarkan struktur di atas, pajung dalam menjalankan pemerintahannya di dalam istana dibantu oleh pakkatenni (Opu Patunru, Opu Pabbicara, Opu Tomarilaleng, dan Opu Balirante). Dalam pemungutan suara, keempat jabatan orang tersebut dianggap satu suara, karena keempat jabatan tersebut dianggap satu kesatuan dalam suatu sistem pemerintahan Kedatuan Luwu. Mereka tidak bisa terpecah dalam bersuara. Hal ini menunjukkan, bahwa jauh sebelumnya sistem kepemimpinan lokal, khususnya di Luwu sudah mengenal nilai-nilai demokrasi yang semestinya sampai saat ini dapat diterapkan dan tidak harus mencontoh sistem demokrasi dari negara barat, sebab kita telah memiliki modal politik yang sesuai dengan budaya masyarakat pendukungnya.

Secara keseluruhan sistem pemerintahan Kedatuan Luwu dikenal dengan *ade seppulo* dua, yaitu satu suara *datu*, 1 suara *pakkatenni* *ade*, 1 suara *kadi* dan 9 suara *ade asera*. Kemudian diasosiasikan dalam budaya Luwu, bahwa angka yang paling tertinggi adalah 12 (*seppulo duo*) dianggap sebagai angka yang paling sempurna.

Ade asera terdiri atas 9 (Sembilan) jabatan dan orang, yang masing-masing dibagi tiga, yakni (1) *bête-bete tellu* terdiri atas *Matowa Wage*, *Matowa Cendrana*, *Matowa Lalantonra*, (2) *Anak Tellue* yang terdiri atas; *Makole Baebunta*, *Madika buah*, *Maddika Ponrang*, (3) *Bendera Tellu* terdiri atas: *goncingnge*, *macangnge*, *kamummue* (Iriani, 2011: 15)

Kadi merupakan perangkat agama yang membawahi *Khatib* dan *Bilal*, dia bertugas mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan agama Islam. Kehadiran *Kadi* dalam struktur pemerintahan Kerajaan Luwu menunjukkan, bahwa Islam pada masa itu merupakan spirit Kedatuan Luwu, bahkan segala mekanisme yang dijalankan di Kerajaan Luwu pada saat itu tidak terlepas dari kontrol ajaran Islam. Tugas dari *ade seppulo* dua adalah sebagai pengambil keputusan dalam pemerintahan Kerajaan Luwu pada masa lampau. Masing-masing perangkat adat tersebut memiliki satu hak suara, termasuk raja (*pajung*), serta *pakkatenni* *ade* memiliki satu suara, walaupun diwakili oleh empat orang (Pangerang, 2011: 21).

C. Konsep Pemimpin (raja) dalam Pemerintahan Tradisional di Kedatuan Luwu

Menurut Setiadi (2011: 280) kepemimpinan merupakan kemampuan dari seseorang untuk mempengaruhi orang lain, yaitu yang dipimpinnya, sehingga orang yang dipimpinnya bertindak laku sesuai yang dikehendaki oleh pemimpinnya. Kemudian sistem kepemimpinan ada dua macam ada yang resmi dan ada yang tidak resmi. Kepemimpinan resmi selalu tersimpul dengan jabatan, sementara kepemimpinan tidak resmi didasarkan pada pengakuan dan kepercayaan masyarakat.

Apabila disimak kedua sistem kepemimpinan yang diuraikan di atas, maka sistem kepemimpinan yang dimaksud dalam tulisan ini adalah sistem kepemimpinan tidak resmi. Raja atau *pajung* memimpin berdasarkan kepercayaan masyarakat, yang sangat terkait dengan istilah *To Manurung*. Bahkan Errington (dalam Gibson, 2009:223) menyatakan bahwa jabatan pada masa Kerajaan Luwu di turunkan ke kandidat berdarah paling murni.

Pemimpin atau raja dalam masyarakat Bugis, seperti di Kedatuan Luwu selalu dikaitkan dengan adanya mitos *To Manurung*, yaitu orang yang turun dari langit. Sehingga *pajung* atau *datu* dianggap sebagai dewa yang turun dari kayangan yang diutus oleh Tuhan untuk memerintah di muka bumi.

Dengan demikian maka keberadaan *pajung* atau pemimpin sangat terkait dengan adanya *To Manurung*, dianggap memiliki sifat-sifat yang sempurna. Pemimpin tersebut dianggap mampu menyelesaikan segala permasalahan yang terjadi dalam masyarakat dan dianggap mampu mempersatukan masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh Setiadi (2011: 779) bahwa munculnya seorang pemimpin biasanya bersamaan dengan keadaan kelompok

yang sedang mengalami kesulitan menentukan langkah-langkah yang diambil untuk menyelesaikan kesulitan. Dalam keadaan demikian maka muncullah seseorang yang memiliki kemampuan yang menonjol yang diharapkan mampu menghadapi kesulitan yang ada. Dengan demikian muncullah seorang pemimpin hasil proses yang dinamis sesuai kebutuhan kelompok.

Secara etimologi “To Manurung” berasal dari kata *to* yang berarti orang dan kata *Manurung* berarti turun. Jadi *To Manurung* secara harafiah berarti orang yang datang dari luar, dari tempat yang tinggi. Oleh karena itu raja atau pajung pada Kedatuan Luwu dianggap sebagai pemimpin yang sempurna yang mampu menguasai semua aspek-aspek kepemimpinan yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Terkait dengan pajung yang dianggap sebagai seorang pemimpin yang harus bisa mensejahterakan masyarakatnya dan harus bisa menjadi seorang pajung atau raja yang tangguh yang bisa menjadi pelindung dan pengayom, masyarakat. Maka dari itu dalam proses pengangkatan pajung diwajibkan melewati proses pengujian sebelum dilantik menjadi pajung.

Adapun proses sebelum dilantik menjadi pajung, yaitu seorang datu harus tinggal di atas panggung kecil yang tinggi tanpa atap, selama sembilan hari sembilan malam. Selama berada di panggung kecil itu, calon pajung hanya diberi minuman sedikit dan tidak diberi bantal. Hal ini bertujuan agar seorang raja/pajung bisa merasakan penderitaan rakyat yang kekurangan makanan dan tinggal dalam rumah yang sempit tanpa atap. Setelah lulus ujian, maka seorang pajung diwajibkan belajar hukum adat dan sistem kepemimpinan, serta etika.

Proses pengangkatan seorang pajung atau raja pada Kedatuan Luwu memperlihatkan bahwa seorang pemimpin harus bisa merasakan apa yang dirasakan oleh rakyatnya. Bukan sekedar raja yang bisa berkuasa dan semena-mena terhadap rakyat. Oleh karena itu pajung dimaknai sebagai payung yang bisa dijadikan sebagai tempat berlindung.

Hal ini juga disebutkan dalam naskah *I La Galigo*, bahwa *Sawerigading* sebelum menjadi pajung di Kedatuan Luwu dianjurkan untuk pergi mengembara untuk belajar teknologi serta pola-pola kepemimpinan semua raja-raja yang ada di muka bumi ini. Dengan harapan seorang pajung harus bisa menguasai aspek kepemimpinan, yang dalam ungkapan bahasa Bugis disebut *nalliburi sulapa eppa’e*, artinya segala segi kehidupan harus dikuasai oleh seorang pajung atau pemimpin.

Selain itu seorang pajung dalam sistem kedatuan Luwu harus *maddara takku* (berdarah putih). Yakni seorang bangsawan murni yang dimaknai sebagai seorang yang memiliki hati yang suci dan murni, bebas dari godaan materi yang bersifat duniawi.

Selain itu, pada sistem kepemimpinan Kedatuan Luwu, dianggap bahwa pajung atau raja yang memiliki hati yang bersih dan batin yang bersih, maka ia mampu mengendalikan diri. Seorang pajung atau raja harus mampu mempersatukan semua aspirasi yang ada dalam masyarakat, yakni mempersatukan aspirasi dari atas dan dari bawah. Hal ini tertuang dalam ungkapan Bugis, bahwa *massorong pawo mangngelle wae pasang* artinya mengalir dari atas seperti air sungai dan berkembang dari bawah seperti air pasang.

Demikian sekilas tentang sifat ideal seorang pemimpin dalam sistem kepemimpinan Kedatuan Luwu yang menjadikan *To Manurung* sebagai simbol budaya politik pada sistem kepemimpinan tradisional Luwu. Oleh karena itu segala yang menyangkut tata kelakuan yang dilakukan oleh *Sawerigading* diusahakan menjadi pola tata kelakuan bagi orang Luwu.

D. Pemikiran Maccae ri Luwu dalam sistem Pemerintahan Tradisional Luwu

Di dalam menjalankan sistem pemerintahannya, seorang pajung atau raja mengalami perubahan, yakni seorang pajung atau raja biasanya mengalami pertambahan sifat-sifat *To Manurungnya*, oleh karena itu dievaluasi oleh seorang boto atau lebih dikenal dengan *Maccae ri Luwu*. Apabila seorang raja tidak mendengar atau menghiraukan wejangan

seorang boto, maka dia dianggap kehilangan sifat To Manurungnya, dengan demikian seorang raja kehilangan legitimasi politiknya sebagai seorang raja dan dewan adat akan memaksa seorang raja meletakkan jabatannya dengan istilah ri sorong rakko lopinna artinya perahunya didorong turun ke laut dalam keadaan air pasang surut (Pangerang, 2000: 70).

Boto merupakan orang yang berada di luar istana dan tidak terikat dengan struktur yang ada di istana, namun pemikiran-pemikirannya melampaui ruang dan waktu, serta sangat obyektif. Oleh karena itu seorang boto menjadi panutan di dalam masyarakat juga sebagai tempat bertanya oleh masyarakat dan juga raja atau pajung. Seperti halnya boto yang dijadikan sebagai tempat bertanya oleh banyak orang termasuk raja atau pajung yang bernama To Ciung Maccae ri Luwu. Kemudian lebih dikenal dengan Maccae ri Luwu. Pemikiran-pemikiran Maccae ri Luwu lah diikuti oleh Datu Luwu di dalam menjalankan pemerintahannya (Rahman, 2000:69).

Oleh karena itu segala yang menyangkut tata kelakuan yang dilakukan oleh Sawerigading diusahakan menjadi pola tata kelakuan bagi orang Luwu. Sebagai pajung Tanah Luwu, maka ia tidak akan mengambil apa-apa dari rakyatnya, kecuali yang diberikan untuk keperluan Tanah Luwu. Menurut keterangan dari beberapa informan, bahwa pada masa dahulu, ketika pajung atau datu selesai menjadi pajung atau selesai tugas kedatuannya atau berakhir masa kedatuannya, tidak pernah memiliki harta melebihi hartanya sebelum ia menjabat sebagai pajung atau datu, maka ia dianggap sebagai pajung atau datu yang mampu mempertahankan kemuliaan tanah Luwu.

Menurut Ibrahim (2002:34) ada beberapa pemikiran-pemikiran yang di jalankan oleh Raja Luwu di dalam menjalankan pemerintahannya, sehingga Kerajaan Luwu pada zaman dahulu menjadi satu kerajaan yang sangat besar dan berjaya. Adapun pemikiran-pemikiran Maccae ri Luwu dapat dilihat pada penjelasan berikut ini:

1. Hati nurani

Maccae ri Luwu menekankan, bahwa hati yang bersih yang dimiliki oleh seorang raja (datu), para bangsawan, pemangku adat dan seluruh masyarakat akan berhubungan sangat erat dengan perilakunya. Oleh karena itu mereka harus memiliki hati yang bening (ati macinnong). Hati nurani yang berada dalam diri manusia merupakan hakekat manusia yang sebenarnya, mata telinga, hidung dan anggota-anggota tubuh lainnya hanyalah menumpang dalam diri manusia. Hati lah yang menggerakkan seluruh anggota tubuh manusia (Ibrahim,2002:36). Oleh karena itu maka segala sesuatu yang ingin dilakukan oleh manusia selalu berdialog dengan hati. Demikian halnya dengan seorang raja dan penegak hukum sebelum memutuskan sesuatu harus mendengar hati nurani.

Terkait dengan hati yang bersih ati macinnong maka pada dasarnya pemikiran Maccae ri Luwu menekankan nilai-nilai, ada tongeng, lempuk, dan getteng. Adapun yang dimaksud dengan ada tongeng artinya perkataan yang benar. Antara perkataan dan perbuatan selalu sama. Ada tongeng harus dimiliki oleh seorang pemimpin pada zaman itu.

Ada tongeng merupakan perkataan yang baik dan benar, dalam hal ini seorang raja harus memiliki nilai tersebut, sehingga apa bila ia berkata, maka kata-katanya adalah benar dan selalu terkait dengan hati yang bersih. Antara kata dan perbuatan selalu sama atau dikenal dengan taro ada taro gau.

Kemudian nilai lempuk merupakan nilai kejujuran atau dalam bahasa Indonesia berarti lurus, tidak bengkok. Orang yang lurus sangat diperlukan dalam memimpin suatu negara atau masyarakat. Nilai inilah yang dimiliki oleh seorang raja/pajung pada masa Kedatuan Luwu, sehingga masyarakatnya aman dan makmur.

Lempuk merupakan kejujuran, sangat penting dimiliki oleh pemimpin pada saat ini, sebab nilai lempuk sangat jarang dimiliki oleh pemimpin saat ini. Padahal kejujuran adalah kunci dari segala perbuatan manusia. Apabila seorang pemimpin memiliki sifat jujur, maka

masyarakatnya akan sejahterah, sebab segala kebijakan-kebijakan yang dibuat didasari dengan kejujuran.

Getteng adalah sifat tegas dari seseorang, dalam hal ini tidak mudah terpengaruh dan goyah, tetap pada pendiriannya atau bersifat konsisten. Sifat ini merupakan salah satu sifat yang dimiliki oleh seorang datu atau raja pada masa lampau di Kedatuan Luwu. Apabila sifat ini tidak dimiliki oleh seorang pemimpin maka, masyarakat yang dipimpinnya akan terombang-ambing.

Nilai-nilai tersebut sangat penting diterapkan pada kondisi saat ini dan perlu dimiliki oleh seorang pemimpin pada saat ini. Sebab dapat dikatakan, sebagian besar pemimpin tidak memiliki nilai ada tongeng, oleh karena itu lain yang di ucapkan lain pula yang dilakukan. Misalnya saja seorang anggota DPR, ketika masih kampanye mereka menjanjikan akan mensejahterakan rakyat, namun setelah menjabat sebagai anggota DPR mereka lupa dengan janji-janjinya itu. Demikian juga program-program yang tidak membolehkan korupsi, namun kenyataannya berbeda. Banyak para pemimpin masuk buih gara-gara korupsi uang rakyat. Hal ini sangat bertentangan dengan nilai ada tongeng yang diterapkan oleh pemimpin di masa Kedatuan Luwu.

2. Perilaku Manusia

Perilaku manusia sangat terkait dengan hati nuraninya, segala perilaku yang baik muncul dari hati nurani yang bersih. Seorang pemimpin atau raja harus menjaga perilakunya. Raja yang mempunyai perilaku yang baik otomatis memiliki hati yang bersih dan bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya, mampu memelihara perkataan yang benar dan melakukan perbuatan yang bermanfaat untuk manusia atau rakyatnya..

Seorang raja harus mampu menunjukkan nilai keteguhan/ketegasan dan kejujuran yang dibuktikan dengan perbuatan. Hal inilah yang diterapkan dalam menjalankan sistem pemerintahan di Kerajaan Luwu pada masa lampau, sehingga ia menjadi sebuah kerajaan yang besar dan terkenal sampai ke Semenanjung Malaysia (Abidin,1999:54). Sifat-sifat semacam inilah yang semestinya dimiliki oleh setiap pemimpin pada saat ini agar masyarakat bisa tentram damai dan sejahterah.

3. Penegakan Supremasi Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu yang sangat penting, karena sangat terkait dengan kesejahteraan dan kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu maka pada masa pemerintahan Kedatuan Luwu, seorang raja atau pajung sangat mengutamakan adanya supremasi hukum dengan menempatkan sesuatu pada tempatnya (asitinajang).

Pada penegakan hukum, Maccae ri Luwu menganjurkan agar berhati-hati menghadapi empat jenis manusia dan perlu ripagettengi beccik atau dibentangkan tali pelurus yang tegas. Adapun orang-orang yang dimaksud yaitu: to mawatangngE (orang yang memiliki kekuatan dan kekuasaan), to majekkoE (orang culas), to maccaE (orang pandai), to benngoE (orang dungu). Keempat orang tersebut akan mempengaruhi penegakan hukum dalam suatu pemerintahan atau masyarakat. Orang yang memiliki kekuasaan dan kekuatan akan menggunakan kekuasaannya untuk melakukan tekanan pada penegak hukum. Orang yang culas akan memutarbalikkan fakta dan kesaksian, orang pintar akan dapat menyusun argumentasi dan pembenaran atas perbuatan yang salah, kemudian orang dungu akan menimbulkan rasa kasihan dan pada akhirnya prinsip asitinajang atau kewajaran akan ditinggalkan (Ibrahim, 2002:41).

Pemikiran Maccae ri Luwu tersebut sangat penting diterapkan pada kondisi saat ini. Dimana saat ini masyarakat bingung mencari keadilan, karena tidak ada supremasi hukum. Para penegak hukum tidak memiliki nilai-nilai yang ada dalam pemikiran Maccae ri Luwu seperti yang dungkapkan di atas. Ada tebang pilih dalam penegakan hukum, uang dan kekuasaan bisa mengalahkan keadilan dalam penegakan hukum. Sehingga apabila orang

miskin atau tidak mampu melakukan pelanggaran hukum dijatuhi hukuman seberat-beratnya. Sementara orang kaya atau penguasa yang melanggar hukum tidak dihukum karena bisa mempengaruhi hakim atau penegak hukum dengan kekuasaannya atau uang yang dimilikinya.

4. Persatuan

“Bersatu kita teguh bercerai kita runtuh” merupakan suatu ungkapan yang digunakan untuk mempersatukan masyarakat. Untuk membentuk suatu masyarakat yang kuat, maka perlu ada persatuan di dalam masyarakat. Menurut Ibrahim (2002:41) Maccae ri Luwu mengungkapkan beberapa pemikirannya tentang pentingnya persatuan, sehingga ada beberapa sifat yang harus dipelihara untuk menciptakan persatuan, yakni:

1. Seia-sekata mereka di dalam negeri (massituruk-i rilalempanuwa)
2. Jujur mereka kepada sesamanya (sialempurenngi)
3. Saling berkata benar di antara mereka (siakkeda-tengengenngi)
4. Saling memelihara sirik (siasirik-i)
5. Dalam duka mereka bersatu, dalam suka mereka bersatu (jaknauru,deceng nauruk)
6. Ke gunung sama mendaki, tidak saling menurunkan ke lembah, (sitereng ribuluk-E, tessinoreng ri lompok-E)
7. Tidak saling berhitung-hitung di antara sesamanya (tessicirinnainngi ri silasanae)
8. Saling membenarkan apa adanya (sipattongenngi ri akkunae)

Dengan tertintegrasinya kedalapan sifat-sifat tersebut pada seorang pemimpin dengan masyarakatnya, maka akan terjalin persatuan di dalam masyarakat, dengan demikian maka negara atau negeri akan kuat, dan tahan terhadap gangguan dari luar. Kemudian persatuan ada beberapa macam menurut pemikiran Maccae ri Luwu, yaitu “bersatu bagaikan telur ayam, bersatu bulat bagaikan beras, dan bersatu bulat bagaikan buluh bambu”.

Persatuan bulat telur dimaknai, bahwa segala masalah yang ada di dalam negara atau negeri dihadapi bersama-sama, baik dalam hal keburukan maupun dalam hal kebaikan. Kemudian persatuan bagaikan bulat beras, dimaknai sebagai suatu persatuan yang bersifat vertikal adalah persatuan antara raja atau pemimpin dengan rakyatnya, sehingga apa yang menjadi kebesaran dari sang raja, akan menjadi kekuatan bagi sang hamba. Tidak ada saling mencurigai antara raja dengan rakyatnya, rakyat tidak menginginkan kedudukan raja, demikian juga sang raja tidak ingin diperhambakan oleh rakyatnya. Tidak ada saling memarahi dan saling dendam.

Hubungan baik antara raja atau pemimpin dengan rakyat berjalan sampai pada anak cucu. Kemudian persatuan bulat bagaikan buluh bambu, yakni antara raja atau pemimpin dengan rakyatnya bersatu dalam suka maupun duka. Sehingga apabila salah satunya khilaf maka saling mengingatkan, apabila jatuh, maka saling membangkitkan. Persatuan ini merupakan persatuan buluh bambu antara bulat di luar dengan di dalam sama, sehingga apabila rusak di luar, maka rusak pula lah di dalam.

Pemikiran Maccae ri Luwu yang telah dijelaskan di atas menunjukkan, bahwa di Sulawesi selatan, seperti di Luwu memiliki nilai-nilai kepemimpinan yang dijadikan sebagai frame of reference dalam komunitasnya. Nilai-nilai tersebut masih relevan digunakan di zaman sekarang ini dan tidak kalah dengan faham modernism. Nilai-nilai kepemimpinan yang dimiliki oleh masyarakat yang bersangkutan sangat terkait dengan sistem budaya yang dimiliki. Salle (2011:1) Nilai-nilai itulah yang mempengaruhi dan membentuk keseluruhan sikap masyarakat terhadap satu orientasi, dan itulah yang muncul atau terpolakan ke atas permukaan dalam kehidupan sosial.

Setiadi (2011:280) menyatakan, bahwa sifat-sifat yang diisyaratkan pemimpin dalam setiap kehidupan sosial tidak sama, sebab didalam setiap kehidupan masyarakat memiliki ketentuan-ketentuan sosial sendiri tentang bagaimana sifat pemimpin yang diharapkan

memiliki kemampuan mengatasi persoalan-persoalan di dalam masyarakat sesuai dengan latar belakang budaya dan falsafah hidup masyarakatnya.

KESIMPULAN

Sistem kepemimpinan tradisional di Luwu dikenal dengan sistem kerajaan atau sistem kedatuan Luwu. Sistem pemerintahan Kedatuan Luwu diperintah oleh seorang datu atau raja dan dibantu oleh beberapa pejabat kerajaan. Ketika raja atau Datu Luwu memerintah, memiliki seorang cerdik pandai yang mengontrol datu atau raja dalam menjalankan pemerintahannya. Oleh karena itu datu atau raja selalu berhati-hati di dalam menjalankan pemerintahannya. Bahkan datu atau raja sering bertanya kepada orang pandai (to acca) untuk menghindari kesalahan didalam menjalankan pemerintahannya. To acca yang dikenal dengan sebutan Maccae ri Luwu.

Sistem pemerintahan tradisional di Luwu menerapkan pemikiran-pemikiran Maccae ri Luwu, oleh karena itu Kerajaan atau Kedatuan Luwu pernah menjadi sebuah kerajaan yang cukup besar dan terkenal di Sulawesi Selatan. Banyak nilai-nilai yang ada dalam pemikiran Maccae ri Luwu yang ada pada zaman dahulu masih relevan digunakan pada saat sekarang. Misalnya nilai kebersihan hati (ati macinnong) yang di dalamnya mencakup, nilai kejujuran, nilai ketegasan, keadilan dan saling menghargai. Demikian juga dengan nilai persatuan yang bisa menjadikan suatu pemerintahan menjadi kuat. Semua nilai-nilai dalam pemikiran Maccae ri Luwu masih sangat dibutuhkan dalam kondisi saat ini, yang mana pada saat ini sistem pemerintahan yang notabene modern, namun tidak menghiraukan nilai-nilai yang semestinya dimiliki oleh seorang pemimpin di dalam menjalankan sebuah pemerintahan. Hilangnya kepercayaan masyarakat kepada pemimpin dan para penegak hukum, yang sangat kontradiktif dengan sistem pemerintahan tradisional, yang sangat kaya dengan nilai-nilai persatuan dan kedamaian.

Saran

Pemilihan anggota legislative di kota palopo merupakan salah satu dinamika politik pada tingkat local, politisasi etnik yang dibangun oleh etnis pendatang, sekiranya harus lebih beradaptasi dengan masyarakat asli kota palopo etnis luwu, yang dimana etnis pendatang adalah sebuah fenomena yang menarik di kota palopo, etnis jawa, etnis tionghoa dan etnis Makassar yang ikut memberikan sumbangsi dalam kemajuan kota palopo hingga saat ini. Ada beberapa saran yang saya coba berikan:

1. Tokoh masyarakat sebagai mainstream politik local harusnya bersikap pluralis, sehingga tercipta dan terbina harmoni kehidupan masyarakat yang multicultural dan mendorong terwujudnya tatanan nilai kearifan yang berorientasi local dan sesuai dengan cita-cita demokrasi.
2. Fanatisme kesukuan ditingkat daerah yang menjadi hambatan integrasi bangsa, semangat ini harusnya di formulasikan lebih demokratis dengan nilai-nilai kearifan local sehingga anggapan bahaya etnosentris dapat dihindari.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, A.Zainal, 1999, Kapita Selekta Sejarah Sulawesi Selatan. Ujung Pandang: Hasanuddin University Press.
- Iriani, 2011. Tari Pajaga Bone Balla Sebagai Cermin Budaya Luwu. Makassar: Dian Istana.
- Ibrahim, Anwar, 2002. Sulesana (Kumpulan Esai Tentang Demokrasi dan Kearifan Lokal). Makassar: Lembaga Penerbitan Universitas Hasanuddin (Lephas).
- Gibson, 2009. Kekuasaan, Raja, Syekh, dan Ambtenaar, Pengetahuan Simbolik dan Kekuasaan Tradisional Makassar 1300-2000. Makassar: Innawa.
- Pangerang, 2000. "Landasan Kultural bagi Civil Society: Perspektif Budaya Luwu". Dalam Ali Fadilah (Ed) Kedatuan Luwu. Makassar: Lembaga Penerbitan Universitas Hasanuddin atas

- Kerjasama dengan Institut Etnografi Indonesia.
- Pangerang, 2011. Sinopsis Kirab Keraton Luwu (Langkanae). Festival Keraton Nusantara XI di Palembang.
- Rahman, Mas'ud, 2000. "Identitas Budaya Luwu: Tinjauan Ringkas". Dalam Ali Fadilah (Ed) Kedatuan Luwu. Makassar: Lembaga Penerbitan Universitas Hasanuddin atas Kerjasama dengan Institut Etnografi Indonesia.
- Setiadi, Elly.M, Usman Kolip, 2011. Pengantar Sosiologi. Jakarta: Kencana.